

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	
BERITA TANDA PERSETUJUAN TESIS	
BERITA ACARA UJIAN TESIS	
ABSTRAK	
ABSTRACT.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR SINGKATAN	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR	
BIODATA	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori	11
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metodologi Penelitian.....	22
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.....	32
A. Tata Kepemerintahan Yang Baik.....	32
B. Standar Akuntansi Pemerintahan.....	56
C. Akuntabilitas.....	57

D.	Laporan Keuangan Berbasis AkruaI	61
BAB III.	IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BERBASIS AKRUAL UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU	67
A.	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Berbasis AkruaI untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.....	67
B.	Kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Berbasis AkruaI untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i>	87
C.	Akibat-akibat Hukum dari adanya Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Berbasis AkruaI Terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	102
BAB IV.	PENUTUP	114
A.	Kesimpulan	114
B.	Saran.....	115
	DAFTAR PUSTAKA	117
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

ADEKSI	:	Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia
ADKASI	:	Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APEKSI	:	Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
APKASI	:	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAR	:	Berita Acara Rekonsiliasi
BPK RI	:	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BP	:	Bendahara Pengeluaran
BPP	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksana Anggaran
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KKN	:	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSAP	:	Komite Standar Akuntansi Pemerintah
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LAN	:	Lembaga Administrasi Negara
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PSAP	:	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
RKA-KL	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SABUN	:	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua

SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintah
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
UNDP	:	<i>United Nation Development Programmer</i>
TAP MPR	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TI	:	Teknologi Informasi
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TPKN	:	Tim Penyelesaian Kerugian Negara
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

- Tabel II.1 : Prinsip *Good Governance* Menurut Bhatta, Gambir, Tahun 1996
- Tabel II.2 : Prinsip *Good Governance* Menurut UNDP (*United Nation Development Programmer*), Tahun 1997
- Tabel II.3 : Prinsip *Good Governance* Menurut Mustopadidjaja, Tahun 1997
- Tabel II.4 : Asas *Good Governance* Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- Tabel II.5 : Prinsip *Good Governance* Menurut Prof. Dr. H. Tjokroamidjojo, Bintoro, MA, Tahun 2000
- Tabel II.6 : Prinsip *Good Governance* Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Tabel II.7 : Prinsip *Good Governance* Menurut Musyawarah Konferensi Nasional Kepemerintahan yang Baik, Disepakati Anggota: APKASI, APEKSI, ADKASI, ADEKSI, Tahun 2001
- Tabel II.8 : Prinsip *Good Governance* Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Tabel II.9 : Prinsip *Good Governance* Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), Tahun 2003
- Tabel II.10 : Asas *Good Governance* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan
- Tabel II.11 : Prinsip *Good Governance* Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Bab 14 tentang Penciptaan Tata Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa
- Tabel II.12 : Prinsip *Good Governance* Menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Tahun 2005 (Hasil Revisi)

DAFTAR GAMBAR

- Gambar III.1 : Proses Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/
Lembaga
Gambar III.2 : Kriteria Umum Opini BPK

